

Kurikulum PPKN Berorientasi *Critical Thinking* dalam Pembentukan Warga Negara Demokratis: Studi Pustaka

Budi Azhari Muda Hasibuan¹, Mora Rizky Adhawiyah², Alya Royani³,
Heri Yanto Zega⁴

Institut Pendidikan Tapanuli Selatan^{1,2,3,4}

budiazhari85@gmail.com¹, morarizky07@gmail.com²,
alyaroyanipakpahan@gmail.com³, heriyantozega46@gmail.com⁴

Diterima: [2026-04-05]

Direvisi: [2026-04-22]

Disetujui: [2026-04-29]

Abstract: *The Citizenship Education (PPKn) curriculum plays a strategic role in shaping democratic citizens amidst the challenges of the 21st century. This study aims to examine the implementation of a PPKn curriculum oriented toward developing critical thinking skills as a primary instrument in fostering democratic character. Using a literature review approach, this research analyzes the concepts of the democratic citizen, the essence and functions of Citizenship Education, and the urgency of integrating critical thinking into the curriculum. The results indicate that a critical thinking orientation in Citizenship Education requires humanistic, dialogical, and reflective learning models and strategies. Systematic and adaptive lesson planning serves as a crucial foundation for integrating these skills into the learning process. The implications of implementing this curriculum not only enhance students' analytical acumen regarding social issues but also strengthen the active participation and responsibility of learners as democratic citizens. Thus, strengthening critical thinking skills within Citizenship Education is an essential step in cultivating a generation capable of navigating the dynamics of social change with wisdom.*

Keywords: *Curriculum, Critical Thinking, Democratic, Citizenship Education.*

Abstrak: Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis di tengah tantangan era abad ke-21. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kurikulum PPKn yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) sebagai instrumen utama dalam pembentukan karakter demokratis. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis konsep warga negara demokratis, hakikat dan fungsi pendidikan PPKn, serta urgensi integrasi *critical thinking* dalam kurikulum tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa orientasi *critical thinking* dalam pembelajaran PPKn memerlukan model dan strategi pembelajaran yang humanis, dialogis, serta reflektif. Perencanaan pembelajaran yang sistematis dan adaptif menjadi fondasi krusial dalam mengintegrasikan keterampilan tersebut ke dalam proses belajar. Implikasi dari penerapan kurikulum ini tidak hanya meningkatkan ketajaman analisis siswa terhadap isu-isu sosial, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif dan tanggung jawab peserta didik sebagai warga negara yang demokratis. Dengan demikian, penguatan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran PPKn merupakan langkah esensial untuk mencetak generasi yang bijaksana dalam menghadapi dinamika perubahan zaman.

Kata Kunci: Kurikulum, *Critical Thinking*, Demokrasi, Pembelajaran PPKn.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana yang sangat krusial dalam membangun peradaban manusia. Sejak abad ke-20, tokoh-tokoh pendidikan seperti John Dewey dan Ki Hadjar Dewantara telah menegaskan bahwa pendidikan menjadi landasan utama bagi kemajuan suatu bangsa. Suatu negara tidak akan mencapai kemajuan tanpa menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Lebih dari sekadar proses penyampaian ilmu pengetahuan, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral, serta mengembangkan kesadaran sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Suharti, J & Haifaturrahmah, 2025). Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas moral dan semangat gotong royong, sebagaimana ditekankan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam konsep Taman Siswa yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran.

Di era globalisasi saat ini, tantangan pendidikan semakin kompleks, mulai dari kesenjangan akses di daerah pedesaan hingga pengaruh teknologi digital yang mengubah paradigma belajar-mengajar. Oleh karena itu,

pemerintah Indonesia melalui Pancasila sebagai dasar negara harus memperkuat pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa, seperti yang tercermin dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan *soft skills*. Tanpa komitmen nasional yang kuat, termasuk alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan UUD 1945, upaya membangun peradaban maju akan sia-sia, karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan bangsa.

Pendidikan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu perubahan yang cukup menonjol adalah pembaruan kurikulum yang kerap dilakukan oleh pemerintah. Sebagai suatu rencana dan pedoman yang mengatur tujuan, mata pelajaran, materi, serta metode dalam proses penyelenggaraan pendidikan, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pembaruan dan evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjawab berbagai tantangan, baik yang bersifat global maupun lokal. Seiring waktu, kurikulum telah mengalami berbagai penyesuaian agar semakin relevan dengan kebutuhan serta nilai-nilai kehidupan modern. Dalam hal ini, kurikulum juga berfungsi sebagai sarana bagi peserta didik untuk mempelajari dan mengembangkan kemampuan dalam melakukan berbagai aktivitas (Zulhuda, R., et al., 2024).

Kurikulum di Indonesia telah berevolusi melalui berbagai fase, mulai dari Kurikulum 1975 yang sederhana hingga Kurikulum Merdeka yang terbaru pada 2022, yang dirancang untuk lebih fleksibel dan berorientasi pada profil Pelajar Pancasila. Perubahan ini sering kali dilakukan secara bertahap dan terkadang tanpa pengumuman besar-besaran, sehingga disebut "secara diam-diam" oleh sebagian kalangan, meskipun sebenarnya melibatkan uji coba di sekolah-sekolah terpilih sebelum diterapkan luas. Tujuannya adalah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan era digital, seperti penguatan literasi teknologi, keterampilan abad 21, dan pendidikan karakter, sambil mengurangi beban mata pelajaran agar siswa lebih fokus pada proyek berbasis masalah nyata. Namun, tantangan utama tetap ada, termasuk ketidakmerataan akses di daerah pedesaan, kurangnya pelatihan guru, serta resistensi dari sistem lama yang kaku. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum harus didukung oleh evaluasi berkelanjutan, keterlibatan stakeholder, dan integrasi nilai-nilai lokal agar benar-benar membentuk SDM unggul yang kompetitif secara global.

Pada masa sekarang, kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dikembangkan oleh setiap individu, termasuk

dalam konteks lingkungan pendidikan di sekolah (Mulyani, A, Y., 2022). Dalam dunia pendidikan, kemampuan berpikir kritis memiliki peran yang sangat penting untuk dikembangkan dan diterapkan karena mampu membantu peserta didik dalam menganalisis permasalahan, mengevaluasi informasi, serta mengambil keputusan secara tepat. Namun, pada kenyataannya, konsep ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat, baik peserta didik maupun pendidik, serta belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Padahal, kemampuan berpikir kritis tidak hanya berfungsi dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan demokratis.

Kemampuan berpikir kritis memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan karakter warga negara yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, integrasi kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran menjadi sangat penting sebagai upaya mendukung terwujudnya warga negara yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai pemikiran, konsep, dan teori yang bersumber dari literatur akademik. Kajian ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis terkait kurikulum PPKn yang berorientasi pada critical thinking dalam pembentukan warga negara demokratis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, dengan menggunakan teknik kajian literatur (*literature review*). Sumber yang digunakan meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga pendidikan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya yang menyoroti pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pembentukan karakter warga negara yang demokratis.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap demokratis melalui penguatan pemahaman, sikap, gagasan, serta keterampilan kewarganegaraan. Upaya ini dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh pemerintah serta berbagai pemangku

kepentingan dalam memperkuat penerapan nilai tersebut di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara (Julita, W., et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat dan Fungsi Pendidikan PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar pada hakikatnya merupakan suatu program pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa, dengan tujuan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Melalui pendidikan ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami nilai tersebut secara teoritis, tetapi juga mewujudkannya dalam bentuk perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Pada tingkat Sekolah Dasar, pembelajaran PPKn juga berfungsi sebagai upaya sadar untuk menyiapkan generasi muda yang kelak mampu menjadi patriot dan pembela bangsa serta negara, dengan membangun kesadaran bahwa cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap negara bukan hanya slogan, tetapi sikap dan tindakan konkret.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga berperan sebagai mata pelajaran pembentukan diri bagi peserta didik yang beragam latar belakangnya, baik dari sisi agama, sosial, bahasa, usia, maupun suku bangsa. Dalam konteks keberagaman tersebut, PPKn berfungsi mengintegrasikan keberbedaan menjadi kekuatan bersama, sehingga peserta didik tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana pembentukan warga negara yang baik, yakni individu yang memiliki penalaran moral dalam bertindak baik di ranah publik maupun privat, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan kepentingan bersama. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai warga negara, karena melalui pendidikan ini mereka dapat memahami dan mengatasi persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta mampu mengenali hak dan kewajibannya secara utuh (Arisandhi, K. P., et al., 2025).

Dalam konteks praktik kependidikan, seringkali manusia merasa bangga dengan ilmu yang dimilikinya, sekaligus mengkaji berbagai fenomena melalui fakta-fakta dan pengalaman pribadinya. Sebagai seorang pendidik, guru PPKn dapat mengamati dan mengkaji karakter peserta didik berdasarkan sikap keseharian mereka, misalnya dalam interaksi antar-teman, respons terhadap

peraturan, serta cara mereka menyelesaikan masalah sederhana di kelas. Berdasarkan pengalaman pribadi penulis sebagai guru PPKn di sekolah dasar, interaksi sehari-hari menjadi sumber refleksi penting untuk memahami sejauh mana nilai-nilai kewarganegaraan sudah terinternalisasi atau masih perlu diperkuat melalui pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan reflektif (Idris, A. Z., et al., 2024).

Dalam kurikulum nasional, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diakui sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan Indonesia karena berperan krusial dalam pembentukan identitas dan karakter peserta didik sejak dini. PPKn menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan formal, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Fungsi utamanya bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang lembaga negara, hak dan kewajiban, serta sistem politik, tetapi juga menekankan pada penginternalisasian nilai-nilai Pancasila, penguatan identitas kebangsaan, dan pembentukan pola pikir kritis dan partisipatif. Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik secara cerdas dan bertanggung jawab (Yunita, S., et al., 2025).

Dengan demikian, hakikat dan fungsi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dipahami sebagai kesatuan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter, yang berpusat pada Pancasila sebagai dasar negara dan kearifan budaya bangsa. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar menjadi fondasi awal pembentukan warga negara Indonesia yang demokratis, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan kesadaran kewarganegaraan yang kuat. Dalam kerangka ini, peran guru, konteks pengalaman di kelas, serta keterpaduan kurikulum nasional menjadi elemen penting yang saling menguatkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan kewarganegaraan secara utuh dan berkelanjutan.

Konsep Dasar Warga Negara Demokratis

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memegang peran penting dalam membentuk generasi penerus yang paham dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara, tidak hanya secara teoritis tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui PPKn, peserta didik diarahkan untuk mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, menghargai proses demokratis, dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan partisipatif (Satriyadi et al., 2023). Dalam konteks ini,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak sekadar menanamkan pengetahuan tentang konstitusi dan lembaga negara, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan yang mendorong keterlibatan warga negara dalam berbagai ranah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Warga negara yang dimaksud bukan sekadar individu yang mengantongi status kewarganegaraan, melainkan orang yang secara sadar dan aktif terlibat dalam urusan publik dan kehidupan sosial komunitas, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Tipe warga negara seperti ini sering disebut sebagai warga negara partisipatif, yaitu individu yang tidak pasif menunggu keputusan, tetapi turut berperan dalam proses pengambilan keputusan bersama. Pendukung pendekatan ini menekankan bahwa partisipasi publik tidak hanya berhenti pada persoalan atau kesempatan komunitas tertentu, tetapi juga berperan dalam membangun hubungan sosial, memperluas pemahaman umum, memperkuat kepercayaan, dan menumbuhkan komitmen kolektif di tengah masyarakat (Manik, T. S., et al., 2026).

Di sisi lain, warga negara sendiri merupakan elemen fundamental dalam keberlangsungan suatu negara, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara (Wahid, S. H., et al., 2025). Keseimbangan ini hanya dapat terwujud apabila warga negara tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab, termasuk dalam berpartisipasi dalam proses politik dan kehidupan sosial. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan yang efektif akan menghubungkan konsep warga negara, hak dan kewajiban konstitusional, serta ideal tipe warga negara partisipatif menjadi satu kesatuan yang utuh. Melalui pendekatan ini, diharapkan terbentuk generasi muda yang tidak hanya memahami posisinya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki kesadaran untuk berperan aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep *Critical Thinking* Dalam Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, kemampuan berpikir kritis menempati posisi yang sangat penting sebagai kompetensi inti yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan ini, peserta didik tidak lagi hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlatih untuk mengkaji, menilai, dan merefleksikan informasi secara mendalam. Proses berpikir kritis diawali dengan mengidentifikasi berbagai bukti yang relevan dengan permasalahan

yang dihadapi, kemudian menganalisis bukti-bukti tersebut untuk menilai tingkat kebenaran, keterkaitan, dan validitasnya. Dari hasil analisis inilah, peserta didik secara bertahap mampu menyusun dugaan atau argumen yang logis dan konsisten dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan demikian, pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran diharapkan dapat membekali peserta didik untuk mengambil keputusan yang tepat, rasional, serta bertanggung jawab dalam berbagai konteks kehidupan (Prayitno, E., 2016).

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, diperlukan langkah-langkah konkret yang terencana dan terstruktur. Salah satu upaya utama adalah penguatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Guru perlu mendapatkan kursus, seminar, maupun pelatihan dalam bentuk workshop yang membekali mereka dengan pemahaman konseptual tentang keterampilan berpikir kritis, strategi pembelajaran yang mendukung, serta cara menilai perkembangan kemampuan tersebut pada peserta didik (Kollo, N., et al., 2024). Dengan pemahaman dan keterampilan yang meningkat, guru akan lebih mampu mengintegrasikan pendekatan yang merangsang berpikir kritis ke dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari, sehingga proses pembelajaran tidak lagi berpusat semata-mata pada penyampaian informasi, tetapi pada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik.

Selain penguatan guru, pengelolaan lingkungan pembelajaran yang kondusif juga menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Sekolah dan guru perlu menciptakan kelas yang mendukung diskusi terbuka, pertanyaan kritis, dan ruang aman untuk menguji ide-ide baru. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyediakan sumber daya, peralatan, dan teknologi yang mendukung pembelajaran interaktif, serta mendorong pola interaksi yang menghargai perbedaan perspektif. Di sisi lain, peran orang tua dan lingkungan rumah juga tidak kalah penting. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dapat membentuk dukungan komunitas yang kuat dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Jika orang tua memahami pentingnya keterampilan berpikir kritis, mereka dapat ikut mendorong anak untuk berpikir kritis di rumah, menyediakan ruang diskusi, serta mendukung kreativitas dan rasa ingin tahu (Kollo, N., et al., 2024).

Dalam praktik pembelajaran, strategi-strategi berbasis kegiatan aktif terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pendekatan seperti studi kasus, bermain peran, diskusi dalam kelompok kecil, dan berbagai aktivitas kreatif lainnya memberikan ruang bagi peserta didik

untuk menggali informasi, mengkonstruksi jawaban, dan menguji argumen mereka sendiri di depan kelas. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga belajar untuk mempertahankan argumen dengan didukung data dan alasan yang logis (Novandi, M., et al., 2025). Dengan mengintegrasikan ketiga hal ini dimulai dari penguatan guru, lingkungan belajar yang mendukung, serta strategi pembelajaran aktif pengembangan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas berpikir peserta didik, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membentuk warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab.

Orientasi *Critical Thinking* dalam Pendidikan

Orientasi berpikir kritis di bidang pendidikan merujuk pada pendekatan terstruktur untuk menjadikan proses pemikiran yang logis, reflektif, dan terlatih sebagai elemen esensial dalam proses belajar mengajar. Menurut Scriven, Paul, dan Angelo dalam Falsaime (dikutip Nurjanah, W., 2020), berpikir kritis adalah proses intelektual yang disiplin, direncanakan dengan baik, dan mahir dalam mengonsepan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, serta mengevaluasi informasi dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi. Proses ini membimbing individu membentuk keyakinan dan mengambil keputusan berdasarkan alasan serta bukti empiris, bukan impuls emosional atau rutinitas belaka. Di ranah pendidikan, hal ini menekankan bahwa kemampuan berpikir kritis bukan tambahan opsional, melainkan fondasi utama bagi siswa untuk menavigasi dunia yang rumit dan dinamis.

Pandangan ini semakin relevan dalam pengembangan pendidikan abad 21, di mana kerangka 4C meliputi *Communication* (komunikasi), *Collaboration* (kolaborasi), *Critical Thinking* (berpikir kritis), dan *Creativity* (kreativitas) menjadi pusat pedagogi (Lestari, R. V. A. & Hindun, 2023). Keempat keterampilan ini saling terkait dan saling mendukung; berpikir kritis berperan sebagai pondasi yang memungkinkan siswa memanfaatkan informasi secara optimal, berdiskusi secara mendalam, berkolaborasi dalam kelompok, serta menciptakan ide-ide inovatif. Pembelajaran berbasis 4C mendorong siswa melampaui hafalan semata, menuju analisis isu, evaluasi argumen beragam, dan penyusunan solusi orisinal yang didukung bukti kuat. Dengan begitu, orientasi berpikir kritis tidak hanya berdiri sendiri, melainkan

terintegrasi erat dengan penguatan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, membentuk pembelajaran yang holistik dan adaptif.

Secara keseluruhan, orientasi berpikir kritis dalam pendidikan melampaui pengolahan informasi semata; ia membentuk pola pikir mendalam, sistematis, dan akuntabel bagi siswa. Kemampuan ini mendorong pemeriksaan ulang asumsi, verifikasi keabsahan data, serta pertimbangan perspektif beragam sebelum bertindak. Ketika digabungkan dengan 4C, orientasi ini menghasilkan pembelajaran aktif, inklusif, dan kontekstual, mengubah siswa dari penerima pasif menjadi agen yang kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menyelesaikan tantangan hidup. Pendidikan semacam ini bukan sekadar opsi, melainkan keharusan untuk melahirkan generasi muda yang tangguh menghadapi dinamika abad 21 dengan bijak dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, penguatan kompetensi 4C tidak terbatas pada pembelajaran intrakurikuler atau kokurikuler. Keterampilan ini juga dapat diasah melalui program ekstrakurikuler, unit kegiatan mahasiswa, program kepemimpinan, serta aktivitas kampus maupun luar kampus lainnya (Arnyana, I, B, P., 2019). Berbagai inisiatif ini membekali mahasiswa dengan soft skills unggul, menjadikan mereka sumber daya manusia yang resilien. Tujuannya bukan hanya mengejar peningkatan IPK; mahasiswa dengan IPK tinggi tapi minim *soft skills* berisiko gagal dalam kehidupan nyata. Integrasi berpikir kritis melalui jalur ini memperkaya fondasi 4C, memastikan lulusan siap bersaing di dunia kerja yang menuntut adaptasi cepat.

Model dan Strategi Pembelajaran PPKn yang Mengembangkan *Critical Thinking*

Sangat esensial bagi siswa untuk mengembangkan karakter demokratis, karena hal ini memfasilitasi kemampuan mereka dalam berinteraksi secara efektif serta berpartisipasi aktif bersama individu lain di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun masyarakat luas. Terkait penanaman karakter tersebut, guru memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan strategi atau metode pembelajaran yang secara khusus mampu merangsang pertumbuhan sikap demokratis. Dengan pendekatan demikian, penanaman karakter demokratis harus dilakukan melalui metode-metode yang terbukti efektif (Setyowati, J., & Utomo, A, C., 2024).

Lebih lanjut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran vital dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika zaman yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas. Desain pembelajaran PPKn idealnya bersifat humanis, dialogis, kritis, serta tetap

berpijak pada nilai-nilai budi pekerti luhur, sehingga dapat secara konsisten membangun kemampuan berpikir kritis pada setiap tahap proses belajar. Melalui strategi ini, siswa tidak sekadar menyerap informasi secara pasif, melainkan dilatih untuk menganalisis isu secara mendalam, menyusun argumen yang kuat, dan membuat keputusan rasional dalam konteks masyarakat demokratis. Model pembelajaran yang menonjolkan diskusi, dialog terbuka, serta refleksi mendalam atas nilai-nilai Pancasila terbukti sebagai alat ampuh untuk menumbuhkan sikap demokratis sambil mengasah ketajaman berpikir kritis (Nuraeni, W., et al., 2025).

Keterkaitan ketiga elemen ini menjadi semakin jelas ketika kita mempertimbangkan peran perencanaan pembelajaran sebagai fondasi utama. Menurut Nana Sudjana, perencanaan didefinisikan sebagai pendekatan metodis untuk menetapkan langkah-langkah masa depan yang tepat, yang menjadi dasar krusial dalam merancang model dan strategi pembelajaran PPKn yang optimal. Di sini, perencanaan tidak terbatas pada penyusunan silabus atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tetapi meluas ke upaya guru dalam membangun kegiatan belajar yang sistematis, terstruktur, dan adaptif terhadap kondisi kelas serta kebutuhan siswa. Dengan menyesuaikan lingkungan belajar, memilih materi yang relevan, serta mengakomodasi faktor kesehatan dan minat siswa, perencanaan matang ini membuka jalan bagi pencapaian tujuan pembelajaran secara lebih efisien dan berdampak (Selvia., et al., 2023).

Secara keseluruhan, ketiga kutipan saling melengkapi membentuk kerangka holistik: karakter demokratis sebagai tujuan akhir, pendekatan humanis-kritis PPKn sebagai jalur pengembangan, dan perencanaan strategis sebagai pondasi pendukung. Integrasi ini tidak hanya memperkaya model pembelajaran PPKn, tetapi juga memastikan pengembangan *critical thinking* yang berkelanjutan, sehingga siswa siap menjadi warga negara partisipatif yang adaptif terhadap perubahan sosial.

Implikasi Kurikulum PPKn Berorientasi *Critical Thinking* terhadap Pembentukan Warga Negara Demokratis

Dalam ranah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), karya peserta didik yang mengekspresikan ide atau konsep harus sarat makna, terutama jika dilihat dari sudut pandang semiotika. Ini tergambar melalui kemampuan mencipta yang inovatif, semangat imajinatif berbasis seni, serta pemicuan imajinasi dan tekad yang kokoh, bukan sikap pasif atau lemah (Adham, M., J., I., 2021). Untuk merealisasikan hal ini, guru memerlukan

dukungan menyeluruh agar dapat menjalankan tugasnya dengan proaktif dan penuh tanggung jawab. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah kreatif menjadi solusi utama, sebab mampu menyambungkan materi ajar dengan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga siswa termotivasi menghubungkan pengalaman pribadi, menggali potensi kreativitas, serta melatih pemecahan masalah di tengah tantangan nyata. Akibatnya, mereka terlatih mengeluarkan ide-ide segar, menghasilkan inovasi, dan berpikir secara lebih ekspansif, dengan efektivitas yang bergantung pada penekanan elemen kunci seperti pembentukan makna mendalam, komunikasi yang tajam, pembangunan pengetahuan kolektif, analisis tajam, pemikiran kritis-kreatif, kolaborasi komunitas, serta evaluasi yang membangun (Mulyani, A. Y., 2022).

Pendekatan semacam ini semakin diperkuat oleh kerangka hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, yang mewajibkan pendidik menguasai empat kompetensi inti: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi ini wajib dikuasai guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk generasi muda berpengetahuan, berkarakter kuat, dan terampil, guna mendukung ketahanan nasional. PPKn sendiri menempati posisi sentral dalam sistem pendidikan Indonesia, karena lulusan yang mendalami mata pelajaran ini, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal diharapkan mampu berkontribusi unggul di bidang pendidikan, politik, dan sektor lainnya (Widiatmaka, P., 2022).

Oleh karena itu, implikasi kurikulum PPKn berorientasi *critical thinking* tidak hanya terletak pada pengayaan keterampilan individu, tetapi juga pada penciptaan warga negara demokratis yang adaptif dan bertanggung jawab. Integrasi kreativitas semiotik, dukungan guru berbasis masalah, dan penguatan kompetensi profesional menciptakan ekosistem pembelajaran holistik yang mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis siswa. Peneliti pun sangat berharap implementasi pembelajaran PPKn yang lebih berkualitas, efektif, dan inovatif dapat segera terwujud, sehingga mampu memaksimalkan *critical thinking skills* peserta didik secara optimal (Rifatunnisa, et al., 2023).

Ketiga sudut pandang ini saling terintegrasi membentuk struktur kokoh: kreativitas bermakna sebagai hasil akhir siswa, kompetensi guru sebagai penggerak utama, serta optimalisasi *critical thinking* sebagai visi jangka panjang. Dengan demikian, kurikulum PPKn bertransformasi dari sekadar wadah penyampaian informasi menjadi fondasi strategis yang melahirkan generasi tangguh, mampu menavigasi kompleksitas demokrasi kontemporer melalui pemikiran inovatif dan keterlibatan proaktif.

KESIMPULAN

Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berorientasi pada *critical thinking* memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara demokratis yang partisipatif, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan era globalisasi. Melalui studi pustaka yang komprehensif, terungkap bahwa hakikat PPKn tidak hanya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis sebagai fondasi utama untuk menganalisis isu sosial, mengevaluasi informasi, serta mengambil keputusan rasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Evolusi kurikulum dari masa kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan perlunya strategi pembelajaran humanis-dialogis, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek berbasis masalah, yang didukung oleh kompetensi guru, lingkungan belajar kondusif, serta keterlibatan stakeholder untuk mengatasi tantangan seperti ketidakmerataan akses dan kurangnya pelatihan pendidik. Implikasi utamanya adalah lahirnya generasi Pelajar Pancasila yang kreatif, kolaboratif, dan kritis, sesuai kerangka 4C (*Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity*), sehingga memperkuat ketahanan nasional dan demokrasi berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham, M. J. I., 2021. Model *Deep Dialogue/Critical Thinking* Sebagai Wujud Wawasan Perbuatan dan Keterlibatan Kebangsaan yang Kritis dan Demokratis. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol. 02. No. 01. Hal. 57.
<https://jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/36>
- Arisandhi, K. P., Sanjaya, D. B., Suastika, I. N., 2025. Memahami Hakikat Pembelajaran PKN Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Vol. 10. No. 03. Hal. 499.
<https://journal.unpas.ac.id>
- Arnyana, I. B. P., 2019. Pembelajaran untuk Meningkatkan Kompetensi 4C (*Communication, Collaboration, Critical Thinking dan Creative Thinking*) untuk Menyongsong Era Abad 21. *Prosiding: Konferensi Nasional Matematika dan IPA Universitas PGRI Banyuwangi*. Vol. 01. No. 01. <https://journal.unibabwi.ac.id>
- Idris, A. Z., Sudarmin., Nurjannah., Andriani, R., 2024. Media dan Teknologi Pembelajaran PPKn dalam Memenuhi Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Saraweta: Jurnal Pendidikan dan Keguruan*. Vol. 02. No. 02. Hal. 170.
<https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/index.php/saraweta/article/download/116/90/685>
- Julita, W., Aulia, R., Windita, D. Z., Kalda, S., Patricia, E., Abdullah, H., & Hasibuan, 2024. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kesadaran Demokrasi. *Pancasila and Civics Education Journal*. Vol. 03. No. 03. Hal. 23-28.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php>
- Kollo, N., Suciptaningsih, O. A., 2024. Keterampilan Berpikir Kritis Siswa melalui Penerapan Kurikulum Merdeka. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*. Vol. 07. No. 02. Hal. 1452-1456.
- Lestari, R. V. A., Hindun., 2023. Penerapan 4C (*Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity*) pada Kurikulum Merdeka di Tingkat SMA. *Reduplikasi*. Hal.21.
<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php>
- Manik, T. S., Purwantiningsih, A., Riyanti, D., 2024. Konstruksi Ideal Warga Negara Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan: Suatu Tinjauan Literatur. *INTEGRALISTIK*. Vol. 35. No. 22. Hal. 21-23.
<https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik>
- Mulyani, A. Y., 2022. Pengembangan *Critical Thinking* Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan*

Pembelajaran. Vol. 01. No. 01. Hal. 100-105.
<https://journal.yp3a.org/index.php/diajar/article/view/226>

Novandi, M., Serani, G., Djudin, T., Suratman, D., 2025. Keterampilan Berpikir Kritis dan Pengajarannya di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa (JPDP)*. Vol. 11. No. 01. Hal. 649-669.
<http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/JPDP>

Nuraeni, W., Komalasari, K., Mahpudz, A., 2025. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Warga Negara Muda Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Vol. 10. No. 02. Hal. 722-730.

Nurjanah, W., 2020. *Historical Thinking Skills and Critical Thinking Skills*. *HISTORIKA*. Vol. 23. No. 01. Hal. 92104.

Prayitno, E., 2016. Pengembangan Berpikir Divergen dan Kritis Melalui Soal Terbuka. *JKPM*. Vol. 03. No. 01. Hal. 19. <http://jurnal.unimus.ac.id>

Rifatunnisa., Tarigan, M., Taofik., Muji, N. C., 2023. Upaya Meningkatkan Critical Thinking Skill dalam Pembelajaran PPKn dengan Model RADEC pada Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar. *DE JOURNAL (Dharmas Education Journal)*. Vol. 04. No. 01. Hal. 161.
<http://ejournal.undhari.ac.id/index.php>

Satriyadi., Fadilla, P. A., Khorunnisa, A., Khairani, Y. D., Khairunnisa., Adilla, N., Kesuma, B., Rangkuti, K. H., Harahap, A. O., Labib, M. D., 2023. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*. Vol. 02. No. 01. Hal. 79-88.

Selvia., Sulistyarini., Purnama, S., 2023. Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran PPKn dengan Menggunakan Model Pembelajaran TANDUR. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*. Vol. 12. No. 03. Hal. 763-773.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php>

Setyowati, J., Utomo, A. C. 2024. Penanaman Karakter Demokratis Melalui Pembiasaan Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Di Sekolah Dasar. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 07. No. 04. Hal. 2627.
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php>

- Suharti, J., & Haifaturrahmah., 2025. Pentingnya Pendidikan Sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTPP)*. Vol. 03. No. 02. Hal. 593-596.
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php>
- Wahid, S. H., Nurandini., Ayuninsi, S., Destiani., Salmi., Haerani., 2025. Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. Vol. 01. No. 03. Hal. 210-219.
<https://teevanjournal.com/index.php>
- Widiatmaka, P., 2022. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 05. No. 01. Hal. 7.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php>
- Yunita, S., Milala, E. B., Siregar, M., Gaol, R. L., Panjaitan, R., 2023. Analisis Kritis Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Indonesia. *Indonesian Journal of Learning Studies*. Vol. 03. No. 01. Hal. 75.
<https://dmijournals.org/ijls/article/view/1664>
- Zulhuda, R., Yuri, C. O., Afriano, A., Zora, F. 2024. Telaah Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Evaluasi, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic (JIPS)*. Vol. 08. No. 03. Hal. 162-169. <http://e-journal.sastraunes.com/index.php/JIPS>